

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI PEMERINTAHAN KABUPATEN SIAK

Oleh : Angga pratama

Pembimbing : Sujianto

Program Studi Ilmu Administrasi Publik - Jurusan Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau
Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293
Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

This research was conducted with limitations in the form of policy implementation and factors that influence the policy to know the implementation of public information disclosure policies and the inhibiting factors in the Siak Regency Government. The research was conducted using a qualitative method with a case study approach. The results of the study indicate that the implementation of the Public Information Disclosure Policy in the Siak Regency Government has not been optimal or well realized. The factors that cause this to happen are the lack of coordination between the government and the community as well as social conditions. Based on these findings, implementors should improve their coordination with related agencies, provide strict sanctions against persons who do not comply with applicable regulations, and improve facilities in the form of health insurance to seek information through information portals. This effort is made to create a more informative government so that people are more concerned with their government following the expectations of the Siak Regency government.

Keywords: *policy, public information disclosure, government, Siak Regency*

PENDAHULUAN

Reformasi ditandai dengan adanya tuntutan tata kelola pemerintahan yang baik yang mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses terjadinya kebijakan publik. Tuntutan ini mendorong hadirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang telah berlaku mulai dari tanggal 30 April 2010. Kabupaten Siak merupakan salah satu daerah yang belum merealisasikan secara baik perihal keterbukaan informasi publik. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya informasi yang sulit untuk di akses secara terbuka oleh publik. Selain itu melalui wawancara bersama pengelola kebijakan informasi publik juga memberikan pernyataan yang terbatas perihal informasi yang dibutuhkan oleh publik.

Kebijakan publik adalah sebuah fakta strategis dari pada fakta politis maupun fakta teknis. Sebagai sebuah strategis, maka di dalam kebijakan publik sudah terangkum preferensi - preferensi politis dari para aktor yang terlibat di dalam proses kebijakan, khususnya pada proses perumusan. Sebagai sebuah strategi maka kebijakan publik tidak saja bersifat positif, namun juga bersifat negatif, di dalam arti pilihan keputusan selalu bersifat menerima salah satu dan menolak yang lain (Nugroho, 2017). Implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai proses menerjemahkan peraturan ke dalam bentuk tindakan (Agustino, 2016). Menurut Ripley dan Franklin, implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang - undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*) (Winarno, 2016).

Penelitian ini di lakukan dengan mewawancarai pengolah kebijakan di Pemerintahan Kabupaten Siak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses serta faktor penghambat dalam implementasi kebijakan keterbukaan

informasi publik di Pemerintahan Kabupaten Siak. Manfaat dari penelitian ini adalah untuk memberikan masukan dan referensi bagi pembuat kebijakan agar bisa dilaksanakan lebih maksimal untuk masa yang akan datang.

Penelitian Sebelumnya

Berdasarkan penelitian sebelumnya oleh Rizky Pratama (2019) degan populasi pemerintah dan Dinas Komunikasi dan Informasi Kab. Majalengka diperoleh hasil bahwa sumber daya manusia dalam implementasi keterbukaan kebijakan informasi publik belum terpenuhi dengan baik.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Tiara Indah (2018) terhadap populasi pemerintahan dan Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Tasikmalya didapatkan hasil bahwa komunikasi antara pembuat kebijakan dengan para implementor dan implementor dengan media lokal sudah berjalan dengan cukup baik.

Penelitian juga dilakukan oleh Herda Hastuti (2016) dengan sampel berupa populasi pemerintahan Kab. Meranti didapatkan hasil bahwa perlu adanya sosialisasi yang dilakukan secara rutin untuk semua pihak menyangkut berlakunya Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP agar semua pihak memiliki persepsi dan pemahaman yang selaras atau sama.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Nunuk Febriah Ningsih (2012) dengan sampel berupa populasi pemerintahan di PBHN didapatkan hasil bahwa pemerintahan perlu meningkatkan kinerja terhadap kebijakan keterbukaan informasi publik agar partisipasi masyarakat terhadap kinerja pemerintah semakin meningkat.

Berdasarkan penelitian terdahulu, dapat diketahui bahwa kebijakan keterbukaan informasi publik tepat pada daerah penelitian belum diteliti. Oleh sebab itu, penelitian mengenai keterbukaan informasi publik (KIP) di Pemerintahan Kabupaten Siak menjadi penting untuk dilakukan.

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik pada suatu daerah tertentu.

DATA DAN METODOLOGI PENELITIAN

Data

Pengambilan data dilakukan pada tahun 2020 di Pemerintahan Kabupaten Siak tepatnya di Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Siak, Komisi Informasi Provinsi Riau dan Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Riau. Pengambilan data dilakukan langsung oleh penulis. Kemudian didukung oleh data sekunder berupa dokumen kebijakan pedoman pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Siak dan Dokumen berupa data laporan evaluasi tahunan tentang penilaian keterbukaan informasi publik di Pemerintahan Kabupaten Siak.

Metodologi Penelitian

1. Wawancara, dilakukan terhadap *key informan* dan *informan tambahan*. Adapun *informan* pada Pemerintahan Kabupaten Siak adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Siak, Sekretaris Daerah Pemerintahan Kabupaten Siak, Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Provinsi Riau, Kepala Komisi Informasi Provinsi Riau dan Tokoh Masyarakat Kabupaten Siak.
2. Observasi, dilakukan terhadap kegiatan pegawai di Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Siak.
3. Dokumentasi, dilakukan pada saat melakukan wawancara dengan *informan* di Dinas Komunikasi dan Informasi di Pemerintahan Kabupaten Siak.
4. Analisis Data, dilakukan dengan menggunakan pendekatan studi kasus berupa pemaparan data dari berbagai sumber dan menghubungkannya

dengan fenomena-fenomena sosial serta menelusuri fakta yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Indonesia merupakan negara hukum dimana segala sesuatu nya memiliki aturan, salah satu aturan yang berlaku di Indonesia adalah kebijakan mengenai keterbukaan informasi publik dimana badan publik memiliki kewajiban untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut agar masyarakat mendapatkan haknya dalam pemenuhan kebutuhan informasi publik. Kebijakan KIP diatur oleh UU No. 14 Tahun 2008 yang berlakunya pada 1 Mei 2010. Idealnya implementasi yang baik menurut Smith dalam (Mulyadi, 2016) terdapat empat indikator yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik, yaitu :

1. Idealized Policy,
2. Target Groups,
3. Implementing Organization
4. Environmental Factors.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap *informan* (Kepala Komisi Informasi Provinsi Riau) mengatakan bahwa Keterbukaan Informasi Publik merupakan suatu program yang harus diikuti dan dijalankan. Keterbukaan Informasi Publik merupakan program untuk menciptakan lingkungan pemerintahan dan badan publik yang bersih dalam menyediakan informasi untuk di konsumsi oleh publik, serta kebijakan ini juga bisa menjadi tolak ukur perencanaan dan evaluasi penilaian lingkungan pemerintahan dan badan publik. Berdasarkan Kegiatan dan Program yang ada dapat disimpulkan bahwa selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi beserta kepala PPID selalu memberikan pemahaman bagaimana pentingnya program Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik agar dapat terus berkembang dengan baik. Kepala

Komisi Informasi Provinsi Riau saling bekerjasama dengan Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi agar di pemerintahan Kabupaten/kota selalu dapat melaksanakan kebijakan ini dengan memfokuskan program dan kegiatan yang mereka lakukan agar menjadi informatif.

Adapun sasaran kebijakan peraturan tersebut adalah Seluruh Badan Publik yang ada di Pemerintahan yang menggunakan APBD dan APBN. Hal ini bertujuan menciptakan pemerintahan yang bersih yaitu merupakan dasar untuk membentuk pelayanan publik yang bagus dan dapat menciptakan *good governance*, serta mengurangi pemerintahan yang menyalahgunakan kepemimpinan untuk melakukan KKN.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Siak, terdapat beberapa instansi yang bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik yaitu :

1. Kementrian Komunikasi dan Informasi
2. Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi
3. Komisi Informasi Provinsi
4. Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten
5. Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID)
6. Badan Publik

Masing-masing implementor memiliki tugas yang berbeda - beda dalam meningkatkan status keterbukaan informasi publik dikarenakan tugas nya yang benar-benar bersentuhan dengan pembangunan desa mulai dari perencanaan hingga evaluasinya. Sedangkan instansi lainnya hanya mengawasi dan menyetujui atau mengesahkan penilaian yang sudah dilakukan oleh desa dan mengirimkannya kepada pemerintah pusat.

Keterbukaan informasi publik juga dipengaruhi oleh kondisi sosial yang memberikan dampak negatif atau positif.

Secara substansi masyarakat dan OPD yang ada di Kabupaten Siak masih kurang memahami program-program yang ada mengenai pentingnya keterbukaan informasi publik yang seharusnya dapat meningkatkan kondisi sosial, dan kepedulian terhadap pemerintahannya. Selain kondisi sosial, kondisi budaya juga merupakan faktor pendukung yang mana di Kabupaten Siak tidak kehilangan kebudayaannya setelah pemerintahannya menjalankan kebijakan tersebut. Kemudian kondisi ekonomi di Pemerintahan Kabupaten Siak keadaan ekonominya sudah dapat perubahan yang positif yang dimana masyarakat di Kabupaten Siak sudah membuat usahanya sendiri yang dapat meningkatkan penghasilan mereka dan itu pun dari segi perkebunan pemerintah harus selalu update pasaran hasil perkebunan untuk masyarakatnya dalam meningkatkan keterbukaan informasi ke masyarakatnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat Kabupaten Siak dapat disimpulkan bahwa koordinasi yang terjadi antara pemerintah dengan masyarakat kurang baik. Dimana koordinasi tidak terstruktur yang mengakibatkan putusnya komunikasi antara pemerintah dengan masyarakatnya. Hal ini menjadikan masyarakat yang paham dan mengikuti program hanyalah tokoh-tokoh masyarakat yang tau saja. Pemerintah Kabupaten Siak dan Tokoh masyarakat masih kurang dapat mensosialisasikan program ke seluruh masyarakatnya yang seharusnya jalur komunikasi dan koordinasi yang dilakukan kepada masyarakat dapat di sosialisasikan oleh perangkat desa masing-masing

KESIMPULAN

Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Pemerintahan Kabupaten Siak dapat disimpulkan bahwa :

1. Implementasi Kebijakan Keterbukaan

Informasi Publik di Pemerintahan Kabupaten Siak masih belum optimal atau terealisasikan dengan baik.

2. Faktor-faktor penghambat dalam implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di Pemerintahan Kabupaten Siak yaitu koordinasi implementor dan kondisi sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2016). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi)*. Bandung: Alfabeta.
- Eko Harry Susanto (2010), dengan judul. *Keterbukaan Informasi Publik dan Pemanfaatan dalam Upaya Pencitraan Positif Polri*.
- Hendra Astuti (2016), dengan judul. *Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti*
- Mulyadi, D. (2016). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Nugroho, R. (2017). *Public Policy (6th ed.)*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Nunuk Febriah Ningsih (2012), dengan judul. *Keterbukaan Informasi dalam Pemerintah Terbuka Menuju Tata Pemerintahan yang Baik*.
- Rizky Pratama (2019), dengan judul. *Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik oleh Dinas Kominfo Pemerintah Kabupaten Majalengka*
- Tiara Indah (2018), dengan judul. *Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik pada Kominfo Kota Tasikmalaya*
- Winarno, B. (2014). *Kebijakan Publik: Teori Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: PT. Buku Seru.